

BAB I

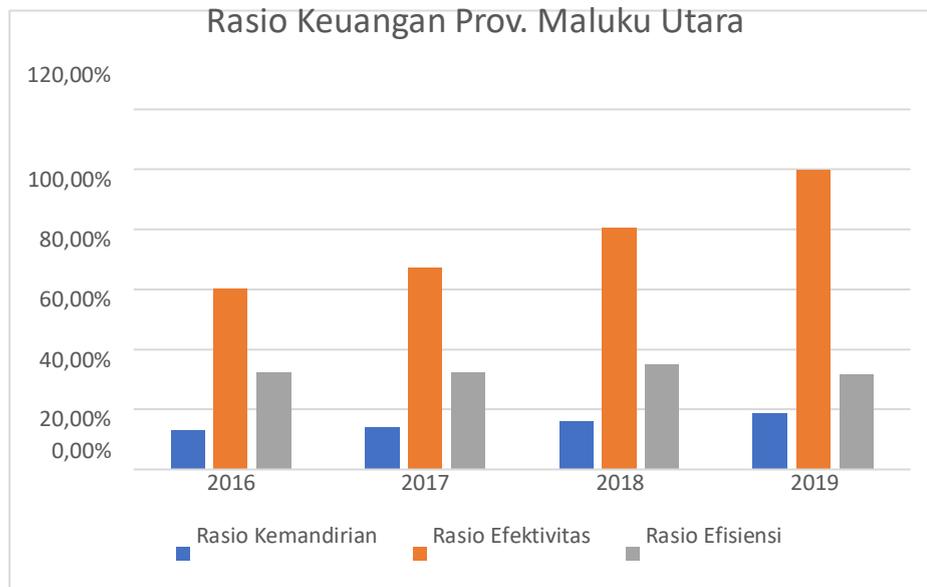
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pengelolaan keuangan daerah, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan standar keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah besar pengaruhnya terhadap nasib suatu daerah. Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan (Kaeng, A. R. 2015).

Menurut Halim (2013), Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan merupakan kesesuaian dari capaian hasil kinerja keuangan dengan target yang telah direncanakan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan (Halim, 2013). Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Rasio keuangan yang digunakan dalam menganalisa kinerja keuangan pemerintah pada penelitian ini meliputi 3 (tiga) rasio, yaitu: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah. Selain itu pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas dan kemampuan keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo, 2009).



Sumber: BPKPAD Provinsi Maluku Utara 2020

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk rasio keuangan provinsi maluku utara masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, akan tetapi untuk rasio efisiensi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 (32,41%) mengalami penurunan dari tahun 2016 32,52%, kejadian yang sama juga terjadi yaitu mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 31,74%. Dari fenomena data ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan provinsi maluku utara penting untuk dilakukan penelitian yang mendalam terkait dengan rasio keuangan sebagai indikator dalam menganalisis kinerja keuangan daerah.

Kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah, menunjukkan kinerja keuangan daerah tersebut. Pengukuran kinerja tersebut dilakukan dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Saputra (2014) mengemukakan bahwa analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan hasil pada antar periode, hal ini dalam rangka mengetahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kinerja keuangan daerah dapat dikatakan baik jika daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Kemandirian merupakan kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi kepada daerahnya. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan.

Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Untuk mendorong pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah perlu memberikan porsi yang lebih besar pada belanja modal dalam komposisi belanja daerah. Belanja modal yang disebut juga belanja pembangunan, mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut Priyo Hari Adi (2006) pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi para investor. Hal ini dapat memberikan peluang pada peningkatan pendapatan per-kapita daerah dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Semakin besar alokasi belanja modal berarti pemerintah semakin serius dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat. Namun saat ini komposisi belanja masih didominasi oleh belanja operasional terutama belanja pegawai.

Pada kondisi infrastruktur daerah yang masih terbatas, maka secara logis pertumbuhan PAD seharusnya lebih banyak diarahkan untuk belanja modal ketimbang belanja lainnya. Pemerintah dapat meningkatkan PAD melalui pungutan yang bersifat retribusi dan pajak atas infrastruktur yang telah dibangun untuk pelayan publik yang bersumber dari dana yang telah dialokasikan dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Sehingga pemerintah daerah secara terus-menerus dapat memacu pertumbuhan kinerja keuangannya. (Darwanis dan Saputra 2014).

Desentralisasi fiskal daerah merupakan prasyarat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Suatu daerah dikatakan mampu untuk melaksanakan otonomi daerah salah satu cirinya terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan penyediaan barang publik

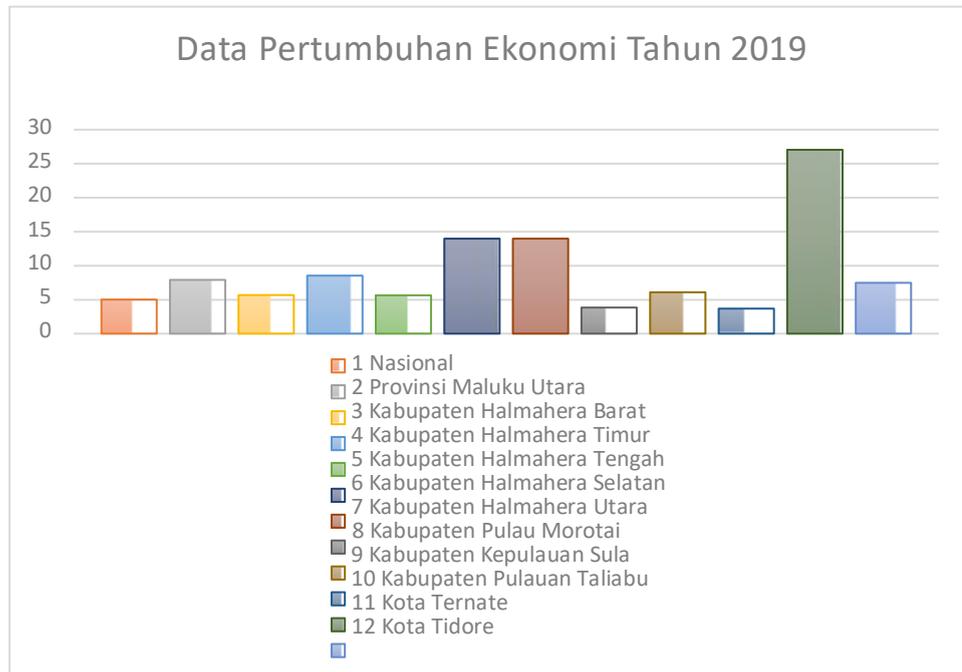
Kemampuan pemerintah daerah untuk melakukan belanja modal tergantung pada kemampuan suatu daerah untuk mencapai target pendapatan atau efektivitas. Apabila target pendapatan tercapai maka pemerintah daerah dapat melakukan belanja modal sesuai yang dianggarkan tanpa pemotongan,

bahkan dapat ditingkatkan jika realisasi pendapatan di atas target. Rasio efektivitas diukur dengan cara membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD yang dihitung berdasarkan alokasi PAD tahun bersangkutan, sehingga suatu daerah dapat dikatakan efektif apabila jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi daripada target yang ditetapkan.

Bagi pemerintah daerah yang dapat mencapai efisiensi keuangan maka akan tersedia dana lebih untuk meningkatkan belanja modal. Rasio efisiensi keuangan daerah, diukur dengan cara membandingkan total pengeluaran daerah dengan total pendapatan daerah. Suatu daerah dikatakan efisien jika pengeluaran daerah kecil dan total pendapatannya tinggi.

Todaro (2003) dalam Sasana (2009) menyampaikan ada tiga faktor dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara, yaitu akumulasi modal, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Akumulasi modal disini erat hubungannya dengan investasi. Kemajuan suatu daerah dapat ditunjukkan salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Untuk dapat meningkatkan investasi, maka kemampuan keuangan daerah juga harus memadai. Indikator besar kecilnya investasi daerah adalah tingginya rasio belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal pada pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh baik tidaknya kinerja keuangan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan alokasi belanja modal serta kinerja keuangan.

Gambaran menyeluruh tentang kondisi perekonomian Provinsi Maluku Utara dapat dilihat melalui neraca ekonomi yang tergambarkan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten provinsi Maluku Utara. Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Provinsi Maluku Utara 2019 sebesar 1.532.892,5 milyar rupiah. *Share* terbesar masih didominasi oleh kelompok pertanian yaitu sebesar 45,05 persen. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2019 sebesar 4,58 persen dimana laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada kelompok Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.



Sumber: BPS, 2021

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi Tahun 2019 Kota Ternate masih konsisten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2019 pertumbuhan Ekonomi kota Ternate tumbuh 27,04%. Disusul Halmahera Utara sebesar 13,98%. Sementara pertumbuhan ekonomi terendah terdapat pada pemerintah daerah Kabupaten Taliabu dengan angka pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,68% disusul kabupaten pulau morotai dengan angka pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,58%. Berdasarkan data BPS diatas menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional, sedangkan hanya kabupaten Pulau Taliabu dan Pulau Morotai yang mengalami pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata nasional.

Menurut Nurhikma Sibua dan Firman Pribadi (2019) Permasalahan keuangan daerah yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku Utara antara lain: (1) Tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap subsidi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin maupun dari sudut anggaran pemerintah daerah, (2) minimnya kemampuan daerah untuk mengelola dan menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercermin dari penerimaan (PAD) yang relatif kecil dibanding total penerimaan

daerah, (3) kurang pemanfaatan, usaha dan kemampuan penerimaan daerah dalam pengelolaan serta menggali potensi-potensi pendapatan yang ada. (4) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Adi (2007), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan pendapat Kuncoro (2004) yang mengemukakan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Hamzah (2008), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh kinerja keuangan pemerintah daerah, ditunjukkan dengan rasio kemandirian dan rasio keserasian berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan rasio efektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Harianto dan Adi (2007), mengatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kawa (2011), menyatakan bahwa rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, rasio keserasian belanja operasional dan rasio keserasian belanja modal berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat menentukan keberhasilan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dengan tata kelola keuangan daerah yang baik diantaranya dengan pengalokasian belanja modal yang tepat maka akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga akan menguji pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengaruh mediasi belanja modal antara kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Adapun judul penelitian yang diambil adalah ***“Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019?
2. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019?
3. Apakah kinerja keuangan berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019?
4. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019?
2. Menganalisis pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019 ?
3. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019 ?
4. Menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2016-2019 ?

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menambah referensi kepustakaan serta wawasan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang tentang kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga kepada pemerintah daerah mengenai kinerja keuangan dan pengaruhnya terhadap pengalokasian belanja modal oleh pemerintah daerah serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian, sehingga kedepannya dapat terlaksana kinerja yang lebih produktif dan efektif.